

Dari Maubereisme ke Dili Pride Parade: Sekularisme dan Transformasi Ruang Politik di Timor-Leste

ABSTRACT

The 2017 Dili Pride Parade presents a paradox in state-religion relations in Timor-Leste. Despite approximately 97% of the population being Catholic and the Catholic Church officially rejecting same-sex relationships, the parade received open support from the government and took place without significant institutional opposition. This article aims to explain why a highly religious state has been able to accommodate the development of political space for the LGBT community without experiencing political delegitimization. Through a historical method based on document analysis, this research traces three historical phases connecting the anti-colonial struggle, the formation of a national narrative through Maubereism, the consolidation of state secularism, and the development of political space for the LGBT community. This research demonstrates that the 2017 Dili Pride Parade was not the starting point of political change, but rather a historical manifestation of successful nation-building that constructed a national narrative through Maubereism and subsequently maintained it through the consensus on secularism among the founding fathers. These findings expand the study of the relationship between nation-building, secularism, and international norm diffusion by showing that the successful internalization of new norms depends on a national narrative that has already acquired historical legitimacy.

Keywords: Timor-Leste, Maubereism, Nation-building, Secularism, Dili Pride Parade.

ABSTRAK

Dili Pride Parade 2017 menghadirkan paradoks dalam hubungan agama dan negara di Timor-Leste. Meskipun sekitar 97% penduduknya beragama Katolik dan Gereja Katolik secara resmi menolak hubungan sesama jenis, parade tersebut memperoleh dukungan terbuka dari pemerintah dan berlangsung tanpa penolakan institusional yang berarti. Artikel ini bertujuan menjelaskan mengapa negara yang sangat religius justru mampu mengakomodasi berkembangnya ruang politik bagi komunitas LGBT tanpa mengalami delegitimasi politik. Melalui metode sejarah berbasis analisis dokumen, penelitian ini menelusuri tiga fase historis yang menghubungkan perjuangan anti-kolonial, pembentukan narasi kebangsaan melalui Maubereisme, konsolidasi sekularisme negara, dan berkembangnya ruang politik bagi komunitas LGBT. Penelitian ini menunjukkan bahwa Dili Pride Parade 2017 bukan merupakan titik awal perubahan politik, melainkan manifestasi historis dari keberhasilan nation-building yang membangun narasi kebangsaan melalui Maubereisme dan kemudian dipertahankan melalui konsensus sekularisme para founding fathers. Temuan ini memperluas kajian mengenai hubungan nation-building, sekularisme, dan difusi norma internasional dengan menunjukkan bahwa keberhasilan internalisasi norma baru bergantung pada narasi kebangsaan yang telah memperoleh legitimasi historis.

Kata Kunci: Timor-Leste, Maubereisme, Nation-building, Sekularisme, Dili Pride Parade.

PENDAHULUAN

Pada 2017 dunia dikejutkan oleh penyelenggaraan Dili Pride Parade pertama di Kota Dili, Timor-Leste. Pada pagi 29 Juni 2017, ratusan orang berkumpul di pusat ibu kota untuk mengikuti pawai tersebut. Sebelum pawai dimulai, seorang biarawati memimpin doa menurut tradisi Katolik, para peserta membuat tanda salib (*sign of the cross*), kemudian berjalan membawa bendera pelangi di jalan-jalan Kota Dili (VICE, 2019). Peristiwa tersebut segera menarik perhatian media dan pengamat internasional karena memperlihatkan wajah Timor-Leste yang tidak lazim dalam perdebatan mengenai agama dan keberagaman seksual.

Bagi banyak pengamat, pemandangan tersebut menghadirkan paradoks yang tidak mudah dijelaskan. Timor-Leste merupakan salah satu negara dengan proporsi penduduk Katolik terbesar di dunia; sekitar 97% penduduknya memeluk agama Katolik (Leach, 2017). Gereja Katolik juga memiliki legitimasi historis yang sangat kuat karena perannya dalam perjuangan kemerdekaan dan pembentukan identitas nasional Timor-Leste. Namun, pada saat yang sama, pemerintah Timor-Leste justru memberikan dukungan terbuka terhadap penyelenggaraan Dili Pride Parade melalui pernyataan resmi Perdana Menteri Rui Maria de Araújo yang menyerukan penghormatan terhadap setiap warga negara tanpa memandang orientasi seksual maupun identitas gender.

Keunikan tersebut tidak berhenti pada sikap pemerintah. Penyelenggaraan Dili Pride Parade pertama diikuti tidak hanya oleh anggota komunitas LGBT, tetapi juga oleh keluarga mereka, organisasi masyarakat sipil, kelompok pemuda, serta warga heteroseksual yang menyatakan solidaritas terhadap prinsip non-diskriminasi (VICE, 2019). Pada tahun berikutnya jumlah peserta meningkat secara signifikan, menunjukkan bahwa dukungan terhadap parade berkembang secara bertahap dalam ruang publik Timor-Leste.

Fenomena tersebut sulit dijelaskan apabila hanya dipahami sebagai konsekuensi meningkatnya dukungan terhadap hak-hak LGBT di tingkat global. Dalam banyak masyarakat yang sangat religius, hubungan antara agama dan gerakan LGBT cenderung diposisikan secara konfrontatif sehingga simbol-simbol keagamaan sering dipahami sebagai antitesis terhadap tuntutan mengenai keberagaman seksual (Niner, 2022). Pengalaman Timor-Leste justru memperlihatkan pola yang berbeda. Dalam pernyataannya menjelang penyelenggaraan Dili Pride Parade, Rui Maria de Araújo menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki potensi untuk berkontribusi terhadap pembangunan bangsa serta mengajak masyarakat Timor-Leste untuk saling menghormati dan menolak diskriminasi (Araújo, 2017). Pemerintah dengan demikian tidak membingkai penghormatan terhadap komunitas LGBT sebagai adopsi agenda liberal global, melainkan sebagai bagian dari komitmen terhadap martabat manusia dan kehidupan berbangsa.

Paradoks tersebut kemudian melahirkan beragam penjelasan dalam literatur mengenai politik kontemporer Timor-Leste. Akan tetapi, masing-masing penelitian menempatkan persoalan tersebut dalam kerangka analisis yang berbeda sehingga belum sepenuhnya menjawab paradoks yang diperlihatkan oleh Dili Pride Parade. Atas dasar itu, artikel ini mengajukan sebuah *empirical puzzle* yang lebih luas daripada sekadar persoalan politik LGBT: mengapa negara yang sangat religius, dengan Gereja Katolik yang memiliki legitimasi historis begitu kuat dalam perjuangan kemerdekaan, justru mampu mengakomodasi berkembangnya norma mengenai non-diskriminasi tanpa mengalami delegitimasi politik maupun mengubah dasar konstitusional republik? Pertanyaan inilah yang menjadi titik tolak penelitian ini.

Berbagai penelitian telah berupaya menjelaskan perkembangan politik Timor-Leste setelah kemerdekaan. Akan tetapi, penjelasan mengenai mengapa negara yang sangat religius justru mampu mengakomodasi berkembangnya ruang politik bagi komunitas LGBT masih tersebar dalam berbagai rumpun kajian yang berdiri sendiri. Secara umum, literatur tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kecenderungan utama, yaitu kajian mengenai *nation-building*, demokratisasi dan hak asasi manusia, serta perkembangan gerakan LGBT di Timor-Leste.

Kelompok pertama memusatkan perhatian pada proses pembentukan negara (*state-building*) dan pembentukan bangsa (*nation-building*) setelah kemerdekaan. Michael Leach berpendapat bahwa tantangan terbesar Timor-Leste setelah 2002 bukan sekadar membangun institusi negara, melainkan membangun identitas nasional yang mampu menyatukan masyarakat yang selama berabad-abad mengalami kolonialisme, pendudukan, serta fragmentasi politik (Leach, 2017). Dalam perspektif ini, keberhasilan republik tidak hanya ditentukan oleh keberadaan lembaga-lembaga negara, tetapi juga oleh kemampuan membangun komunitas politik yang memiliki identitas kebangsaan bersama.

Kajian tersebut kemudian diperkaya oleh Elfie Shiosaki melalui analisis mengenai krisis politik 2006. Shiosaki menunjukkan bahwa krisis tersebut memperlihatkan munculnya kembali pembelahan antara *ema lorosa'e* (masyarakat Timor-Leste bagian timur) dan *ema loromonu* (masyarakat Timor-Leste bagian barat). Dalam bahasa Tetun, *lorosa'e* secara harfiah berarti "tempat matahari terbit" (timur), sedangkan *loromonu* berarti "tempat matahari terbenam" (barat). Menurut Shiosaki, identitas regional yang semula bersifat laten berubah menjadi identitas politik ketika perselisihan di dalam sektor keamanan berkembang menjadi konflik nasional (Shiosaki, 2017).

Pembelahan tersebut berawal dari pemecatan sekitar 600 prajurit Falintil-FDTL yang sebagian besar berasal dari wilayah barat. Mereka menuduh pimpinan militer melakukan diskriminasi terhadap personel *loromonu* dalam

promosi jabatan dan penempatan, sedangkan kelompok *lorosa'e* dipersepsikan memperoleh posisi yang lebih dominan karena banyak berasal dari jaringan inti gerakan perlawanan bersenjata pada masa pendudukan Indonesia. Perselisihan di tubuh militer kemudian meluas menjadi kekerasan politik yang melibatkan kepolisian, kelompok sipil, dan elite nasional hingga memicu pengunduran diri Perdana Menteri Mari Alkatiri. Bagi Shiosaki, peristiwa tersebut menunjukkan bahwa persoalan identitas regional merupakan salah satu ujian terbesar bagi proses *nation-building* di Timor-Leste.

Kelompok penelitian kedua lebih banyak membahas konsolidasi demokrasi dan perkembangan hak asasi manusia di Timor-Leste. Kajian-kajian tersebut menempatkan Timor-Leste sebagai salah satu contoh penting keberhasilan transisi dari masyarakat pascakonflik menuju negara demokratis melalui pembangunan institusi politik, penyelenggaraan pemilu yang kompetitif, serta keterlibatan aktif dalam berbagai mekanisme hak asasi manusia internasional. Dalam perspektif ini, menguatnya masyarakat sipil dan semakin luasnya partisipasi warga dipahami sebagai bagian dari proses konsolidasi demokrasi pascakemerdekaan.

Sementara itu, kelompok penelitian ketiga secara khusus mengkaji perkembangan gerakan LGBT di Timor-Leste. Sara Niner menunjukkan bahwa kemunculan gerakan LGBT berkaitan erat dengan perubahan relasi gender dalam masyarakat pascakonflik serta kemampuan organisasi masyarakat sipil membangun koalisi dengan kelompok perempuan, organisasi pemuda, dan jaringan hak asasi manusia (Niner, 2022). Dari perspektif hubungan internasional, Yanapon Musiket menjelaskan perkembangan tersebut melalui kerangka *norm life cycle* yang dikembangkan oleh Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink. Menurutnya, berkembangnya ruang politik bagi komunitas LGBT merupakan hasil interaksi bertahap antara *norm entrepreneurs*, organisasi internasional, dan elite politik domestik sehingga norma mengenai non-diskriminasi memperoleh legitimasi secara bertahap dalam ruang publik Timor-Leste (Musiket, 2023).

Masing-masing kelompok penelitian tersebut memberikan kontribusi yang sangat penting bagi pemahaman mengenai perkembangan politik kontemporer Timor-Leste. Namun demikian, fokus analisisnya masih bergerak pada jalur yang relatif terpisah. Kajian *nation-building* menjelaskan pembentukan identitas nasional dan kohesi politik, sementara penelitian mengenai demokrasi, hak asasi manusia, dan gerakan LGBT lebih banyak menekankan konsolidasi demokrasi, difusi norma internasional, maupun dinamika masyarakat sipil. Akibatnya, hubungan historis antara pembentukan narasi kebangsaan, konsensus sekularisme para *founding fathers*, dan munculnya ruang politik bagi komunitas LGBT belum memperoleh penjelasan yang utuh. Persoalan inilah yang menjadi titik berangkat artikel ini.

Masing-masing kelompok penelitian tersebut memberikan kontribusi yang penting bagi pemahaman mengenai perkembangan politik kontemporer Timor-Leste. Namun, kajian-kajian tersebut umumnya bergerak dalam jalur analisis yang berbeda. Penelitian mengenai *nation-building* berfokus pada pembentukan identitas nasional, kohesi sosial, dan konsolidasi negara pascakemerdekaan. Sebaliknya, penelitian mengenai demokrasi, hak asasi manusia, dan gerakan LGBT lebih banyak menjelaskan perluasan ruang politik sebagai konsekuensi konsolidasi demokrasi maupun difusi norma internasional. Akibatnya, hubungan historis antara pembentukan narasi kebangsaan, konsensus sekularisme para founding fathers, dan berkembangnya ruang politik bagi komunitas LGBT belum memperoleh penjelasan yang utuh.

Berangkat dari persoalan tersebut, artikel ini mengajukan pertanyaan: mengapa negara yang sangat religius dengan mayoritas penduduk beragama Katolik justru mampu mengakomodasi berkembangnya ruang politik bagi komunitas LGBT tanpa mengalami delegitimasi politik maupun mengubah dasar konstitusional republik?

Berbeda dengan sebagian besar penelitian terdahulu yang memandang Dili Pride Parade sebagai konsekuensi demokratisasi atau keberhasilan difusi norma internasional, artikel ini berargumen bahwa peristiwa tersebut hanya dapat dipahami apabila ditempatkan dalam lintasan sejarah *nation-building* Timor-Leste. Dengan kata lain, Dili Pride Parade bukan merupakan titik awal perubahan politik, melainkan manifestasi historis dari narasi kebangsaan yang dibangun melalui Maubereisme dan kemudian dipertahankan melalui konsensus sekularisme para *founding fathers*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan kualitatif untuk menelusuri proses terbentuknya sekularisme negara di Timor-Leste dan implikasinya terhadap munculnya ruang politik bagi kelompok LGBT. Pendekatan sejarah dipilih karena persoalan yang dikaji tidak dapat dipahami hanya melalui analisis terhadap kebijakan kontemporer, melainkan harus ditelusuri melalui proses pembentukan negara (*state formation*) sejak perjuangan anti-kolonial hingga periode pascakemerdekaan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjelaskan hubungan kausal antara pembentukan identitas nasional, konsolidasi sekularisme, dan munculnya ruang politik bagi kelompok minoritas seksual.

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan *historical institutionalism* yang menekankan pentingnya proses historis dalam membentuk pilihan-pilihan

institusional negara. Pendekatan ini dipadukan dengan *process tracing* untuk menelusuri keterkaitan antarperistiwa secara kronologis sekaligus kausal, mulai dari pembentukan identitas nasional Maubere pada masa perjuangan kemerdekaan, konsolidasi sekularisme setelah kemerdekaan, hingga terbentuknya ruang politik yang memungkinkan penyelenggaraan Dili Pride Parade. Pendekatan tersebut memungkinkan setiap tahapan dianalisis sebagai bagian dari satu rangkaian proses, bukan sebagai peristiwa yang berdiri sendiri.

Sumber penelitian terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi *Jornal do Povo Maubere*, koran mingguan berbahasa Portugis yang diterbitkan Fretilin pada 1975, Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste, dokumen-dokumen resmi Fretilin, pidato para *founding fathers* seperti Xanana Gusmão, José Ramos-Horta, dan Mari Alkatiri, serta berbagai memoar perjuangan. Sementara itu, sumber sekunder mencakup karya-karya akademik mengenai sejarah politik Timor-Leste, hubungan agama dan negara, sekularisme, nasionalisme, serta perkembangan politik LGBT yang ditulis oleh Peter Carey, James Dunn, Geoffrey Gunn, Jill Jolliffe, Bilveer Singh, Júlio Tomás Pinto, Vicente Paulino, Camila Tribess, dan sejumlah peneliti lainnya.

Analisis dilakukan melalui pembacaan kritis terhadap berbagai sumber tersebut dengan menggunakan dua kerangka konseptual. Pertama, konsep nasional-populer dari Antonio Gramsci digunakan untuk menjelaskan bagaimana identitas Maubere dikonstruksi sebagai identitas politik yang mampu melampaui identitas keagamaan dalam proses *nation-building*. Kedua, teori *norm life cycle* yang dikembangkan Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink digunakan untuk menjelaskan bagaimana norma mengenai hak-hak LGBT memperoleh ruang politik setelah sekularisme negara terkonsolidasi. Kedua kerangka tersebut tidak diperlakukan sebagai teori yang berdiri sendiri, melainkan digunakan secara komplementer untuk membaca hubungan antara pembentukan negara dan perkembangan norma politik kontemporer.

Berdasarkan pendekatan tersebut, penelitian ini tidak memposisikan Dili Pride Parade sebagai titik awal analisis, melainkan sebagai hasil dari proses historis yang telah berlangsung sejak perjuangan anti-kolonial. Oleh karena itu, fokus utama penelitian bukan terletak pada dinamika internal gerakan LGBT, tetapi pada perubahan institusional yang memungkinkan negara menyediakan ruang politik bagi kelompok minoritas seksual di Timor-Leste.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjuangan Meraih Kemerdekaan (1975–2002): Maubereisme sebagai Narasi Perlawanan dan Fondasi Narasi Kebangsaan Timor-Leste

A luta continua! Perjuangan pertama bangsa Timor-Leste bukan hanya ditujukan untuk memperoleh kemerdekaan dari kolonialisme Portugis dan pendudukan Indonesia, tetapi juga untuk membangun sebuah narasi kebangsaan yang mampu menyatukan masyarakat Timor di tengah fragmentasi politik, sosial, bahasa, dan agama (Mohammad, 2023). Oleh karena itu, pembahasan mengenai sekularisme maupun ruang politik bagi kelompok LGBT pada periode pascakemerdekaan tidak dapat dilepaskan dari proses historis pembentukan identitas nasional yang berlangsung sejak dekolonisasi Portugis. Dalam artikel ini, Maubereisme dipahami bukan semata-mata sebagai ideologi Fretilin, melainkan sebagai narasi politik yang secara bertahap berkembang menjadi fondasi kebangsaan Timor-Leste (Horta, 1987).

Momentum pembentukan narasi tersebut berawal dari Revolusi Anyelir (*Revolução dos Cravos*) di Portugal pada 25 April 1974 yang mengakhiri rezim otoriter *Estado Novo* sekaligus membuka proses dekolonisasi di berbagai wilayah jajahannya, termasuk Timor Portugis. Perubahan politik di Lisboa mengakhiri sistem kolonial yang selama berabad-abad membatasi partisipasi politik masyarakat lokal dan secara tiba-tiba membuka ruang kompetisi bagi berbagai kekuatan politik di Timor (Singh, 1996). James Dunn menilai bahwa transisi tersebut berlangsung sangat cepat sehingga masyarakat Timor harus menghadapi proses dekolonisasi tanpa pengalaman politik modern yang memadai (Dunn, 2003). Geoffrey Gunn menambahkan bahwa kekosongan kekuasaan setelah Revolusi Anyelir menciptakan situasi yang memungkinkan munculnya berbagai proyek politik yang saling bersaing untuk mendefinisikan masa depan Timor (Gunn, 2006). Dari sudut pandang yang berbeda, E.M. Tomodok, yang saat itu menjabat sebagai Konsul Indonesia terakhir di Timor Portugis, menggambarkan bahwa dinamika politik di Dili berubah hampir dari hari ke hari seiring lahirnya organisasi-organisasi politik baru yang menawarkan jalan berbeda menuju masa depan wilayah tersebut (Tomodok, 1996).

Dalam konteks tersebut lahirlah beberapa partai politik, antara lain União Democrática Timorense atau Uni Demokratik Timor (UDT), Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente atau Front Revolusioner untuk Kemerdekaan Timor-Leste (Fretilin), Associação Popular Democrática Timorense atau Asosiasi Demokratik Rakyat Timor (Apodeti), Klibur Oan Timor Asuwain atau Asosiasi Pahlawan Timor (KOTA), dan Partido Trabalhista atau Partai Buruh (Revolta, 2017). Perbedaan di antara mereka tidak hanya berkaitan dengan pilihan mengenai kemerdekaan atau integrasi, tetapi juga menyangkut visi mengenai bentuk masyarakat yang hendak dibangun setelah kolonialisme

berakhir (Jolliffe, 1978). Helen Hill menunjukkan bahwa dekolonisasi di Timor Portugis sejak awal bukan sekadar pertarungan antara kelompok pro-kemerdekaan dan pro-integrasi, melainkan juga kompetisi berbagai gagasan mengenai nasionalisme, pembangunan sosial, dan hubungan dengan dunia luar (Hill, 2002). Dengan demikian, tantangan pertama gerakan kemerdekaan bukanlah mengusir kekuatan asing semata, melainkan membangun identitas bersama yang mampu melampaui kepentingan masing-masing organisasi politik.

Di antara berbagai organisasi tersebut, Fretilin berkembang menjadi aktor yang paling konsisten merumuskan proyek nasional yang berorientasi pada kemerdekaan penuh. Manifesto Fretilin tahun 1974 menegaskan bahwa organisasi tersebut dibentuk sebagai front yang menyatukan kelompok-kelompok nasionalis dan anti-kolonial dalam perjuangan membebaskan rakyat Timor dari kolonialisme. Program politiknya menekankan reorganisasi masyarakat, reforma agraria, pembentukan koperasi, perluasan pendidikan rakyat, dan partisipasi politik masyarakat sebagai bagian dari proyek pembebasan nasional (CAVR, 2005). Sebagaimana ditunjukkan Melissa Johnston, program pendidikan politik Fretilin banyak dipengaruhi oleh pemikiran Paulo Freire mengenai *conscientização* (Freire, 1985)—yaitu pembentukan kesadaran politik rakyat sebagai syarat utama pembebasan dari penindasan kolonial (Freire, 1985). Oleh sebab itu, perjuangan kemerdekaan sejak awal dipahami bukan sekadar proses memperoleh kedaulatan formal, tetapi juga transformasi masyarakat menuju bangsa yang mampu menentukan nasibnya sendiri.

Meskipun demikian, Fretilin menyadari bahwa sebuah proyek kemerdekaan tidak dapat bertumpu hanya pada organisasi politik. Kemerdekaan memerlukan identitas kolektif yang mampu diterima oleh masyarakat yang memiliki latar belakang etnis, bahasa, dan wilayah yang beragam. Dalam konteks inilah konsep Maubere memperoleh arti strategis (Horta, 1996). Istilah yang sebelumnya digunakan secara peyoratif oleh administrasi kolonial Portugis untuk merujuk masyarakat pedesaan Timor direbut kembali (*reappropriated*) oleh para intelektual Fretilin dan diubah menjadi simbol kebanggaan nasional, solidaritas rakyat, dan perlawanan anti-kolonial (Paulino, 2011). John G. Taylor mencatat bahwa transformasi makna tersebut merupakan salah satu inovasi politik terpenting dalam sejarah nasionalisme Timor karena berhasil mengubah istilah yang semula mengandung stigma kolonial menjadi identitas yang mempersatukan perjuangan rakyat (Taylor, 1999).

Produksi identitas Maubere tidak berlangsung secara spontan, melainkan melalui kerja intelektual dan kultural yang sistematis. Salah satu instrumen terpentingnya ialah *Jornal do Povo Maubere*, surat kabar yang diterbitkan Fretilin sejak 1975. Berbeda dengan surat kabar biasa yang berfungsi menyampaikan informasi, *Jornal do Povo Maubere* secara konsisten membangun narasi mengenai siapa yang disebut sebagai bangsa Timor-Leste

dan siapa yang menjadi subjek perjuangan nasional. Dalam berbagai artikelnya, istilah Maubere tidak digunakan sebagai kategori etnis maupun agama, melainkan sebagai identitas politik yang mencakup seluruh rakyat yang terlibat dalam perjuangan melawan kolonialisme (*Jornal do Povo Maubere*, 1975). Vicente Paulino menunjukkan bahwa perubahan tersebut memungkinkan konsep Maubere berkembang dari simbol sosial menjadi simbol kebangsaan yang melampaui identitas-identitas lokal (Paulino, 2011). Pembacaan serupa juga ditunjukkan Camila Tribess yang melihat narasi perjuangan Fretilin sebagai proses pembentukan memori kolektif mengenai bangsa Timor-Leste melalui produksi simbol, bahasa, dan sejarah bersama (Tribess, 2019).

Peranan penting dalam produksi narasi tersebut juga dimainkan oleh Francisco Borja da Costa, penyair, jurnalis, sekaligus salah seorang intelektual Fretilin. Melalui puisi, lagu, dan berbagai tulisan politiknya (da Costa, 1975), Borja da Costa berupaya membangun imajinasi mengenai Timor sebagai komunitas politik yang memiliki masa depan bersama (Ferreira & Savio, 2022). Dalam karya-karyanya, kemerdekaan tidak digambarkan sebagai kemenangan satu kelompok politik, melainkan sebagai pembebasan seluruh rakyat Timor dari kolonialisme. Karena itu, sebagaimana ditunjukkan Peter Carey, perjuangan bersenjata dan perjuangan kultural berkembang secara bersamaan; keduanya sama-sama diperlukan untuk membentuk kesadaran nasional yang melampaui batas-batas lokal maupun afiliasi politik (Carey, 2007).

Narasi kebangsaan tersebut semakin memperoleh daya rekat melalui penggunaan bahasa Tetun. Di tengah keragaman linguistik masyarakat Timor, Tetun berkembang menjadi medium komunikasi bersama yang mempertemukan berbagai komunitas lokal dalam satu ruang politik yang sama. Penelitian Mohammad menunjukkan bahwa selama perjuangan kemerdekaan, Tetun mengalami transformasi dari bahasa sehari-hari menjadi bahasa perjuangan yang memproduksi solidaritas nasional dan memperkuat identitas Maubere (Mohammad, *unpublished manuscript*). Temuan tersebut melengkapi kajian Geoffrey Hull mengenai perkembangan Tetun sebagai salah satu unsur penting dalam pembentukan identitas nasional Timor-Leste (Hull, 2001). Dengan demikian, bahasa tidak sekadar berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan narasi kebangsaan.

Namun demikian, hingga penghujung tahun 1975, narasi Maubere masih berkembang terutama dalam orbit Fretilin (*Jornal do Povo Maubere*, 1975). Meskipun berhasil membangun identitas perlawanan yang semakin luas, proyek tersebut belum sepenuhnya mampu mengintegrasikan seluruh spektrum politik Timor, terutama kelompok-kelompok yang sebelumnya memiliki hubungan tegang dengan Fretilin, termasuk sebagian elite UDT dan unsur Gereja Katolik (Singh, 1998). Situasi tersebut berubah secara drastis ketika Indonesia melancarkan Operasi Seroja pada 7 Desember 1975. Invasi tersebut bukan hanya mengubah arah perjuangan kemerdekaan, tetapi juga memaksa seluruh gerakan

perlawanan untuk mentransformasikan Maubereisme dari identitas sebuah gerakan revolusioner menjadi narasi kebangsaan yang mampu mempersatukan seluruh rakyat Timor-Leste. Dari titik inilah perjuangan memasuki babak baru (Horta, 1996).

Namun demikian, pendudukan Indonesia juga memperlihatkan keterbatasan proyek politik yang terlalu bertumpu pada satu organisasi. Selama fase awal perjuangan kemerdekaan, Fretilin memang menjadi motor utama perjuangan kemerdekaan, sementara Falintil berfungsi sebagai sayap bersenjata yang mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 28 November 1975 (Dunn, 2003). Akan tetapi, rangkaian operasi militer Indonesia pada akhir 1970-an mengakibatkan struktur kepemimpinan Fretilin mengalami pukulan yang sangat berat. Banyak pemimpin gugur di medan perang, jaringan komunikasi terputus, dan basis-basis gerilya di pedalaman semakin terisolasi (Taylor, 1999). Situasi tersebut memunculkan kesadaran bahwa keberlangsungan perjuangan tidak dapat terus bergantung pada kemampuan satu partai politik semata.

Krisis tersebut sekaligus mengubah cara para pemimpin perlawanan memahami makna kemerdekaan. Jika pada masa dekolonisasi Portugis perdebatan utama berkisar pada pilihan ideologi dan arah politik negara yang akan dibentuk, maka selama masa pendudukan persoalan yang jauh lebih mendesak adalah bagaimana menyatukan seluruh unsur masyarakat Timor-Leste yang sama-sama menolak integrasi ke Indonesia. Geoffrey Gunn mencatat bahwa pengalaman pendudukan secara perlahan mengikis polarisasi politik yang sebelumnya muncul pada 1974–1975 dan mendorong berkembangnya kesadaran mengenai pentingnya persatuan nasional sebagai prasyarat kemenangan perjuangan (Gunn, 2006). Pengalaman serupa juga tergambar dalam kesaksian-kesaksian yang dihimpun CAVR, yang menunjukkan bahwa jaringan perlawanan tidak lagi hanya bertumpu pada struktur partai, tetapi juga melibatkan masyarakat sipil, jaringan bawah tanah, komunitas keagamaan, dan diaspora Timor-Leste (CAVR, 2005).

Perubahan tersebut turut memengaruhi posisi Falintil dalam perjuangan kemerdekaan. Pada awal pendudukan, Falintil masih dipahami sebagai angkatan bersenjata Fretilin. Akan tetapi, semakin panjang pendudukan berlangsung, semakin tampak bahwa identifikasi tersebut justru menyulitkan upaya memperluas basis dukungan politik. Sarah Niner menunjukkan bahwa pengalaman reorganisasi gerakan pada awal dekade 1980-an mendorong munculnya gagasan agar Falintil tidak lagi dipersepsikan sebagai milik satu partai, melainkan sebagai kekuatan nasional yang mewakili seluruh rakyat Timor-Leste. Gagasan tersebut kemudian menjadi salah satu fondasi terpenting dalam strategi politik Xanana Gusmão pada dekade berikutnya (Niner, 2000).

Perubahan cara pandang tersebut juga menandai transformasi makna Maubere. Apabila pada pertengahan 1970-an istilah tersebut berfungsi sebagai

simbol mobilisasi politik Fretilin, maka pengalaman panjang menghadapi pendudukan Indonesia secara bertahap memperluas maknanya menjadi simbol perjuangan nasional yang melampaui batas-batas organisasi politik (Horta, 1987). Michael Leach menjelaskan bahwa selama periode perjuangan kemerdekaan terjadi evolusi dari berbagai *nation-of-intent* yang saling bersaing menuju suatu konsepsi nasionalisme yang lebih inklusif dan mampu mengakomodasi keragaman kekuatan politik Timor-Leste. Dalam kerangka tersebut, Maubere tidak lagi hanya merepresentasikan identitas sebuah gerakan revolusioner, tetapi mulai berkembang sebagai narasi bersama mengenai siapa yang disebut sebagai bangsa Timor-Leste (Leach, 2023).

Transformasi inilah yang kemudian membuka ruang bagi perubahan strategi perjuangan pada paruh kedua dekade 1980-an. Di bawah kepemimpinan Xanana Gusmão, fokus perjuangan secara bertahap bergeser dari mempertahankan dominasi satu organisasi menuju pembangunan sebuah front nasional yang mampu menyatukan berbagai kekuatan politik, kelompok keagamaan, jaringan bawah tanah, dan diaspora dalam satu proyek kemerdekaan. Dari titik inilah perjuangan Timor-Leste memasuki fase baru yang kelak melahirkan CNRM sebagai simbol persatuan nasional dan menjadi fondasi bagi narasi kebangsaan yang diwarisi negara Timor-Leste setelah kemerdekaan (Pinto, 2015).

Transformasi tersebut tidak terjadi secara spontan, melainkan melalui serangkaian keputusan politik yang secara sadar mengubah orientasi gerakan kemerdekaan. Xanana Gusmão menyadari bahwa kemenangan tidak mungkin dicapai apabila perjuangan terus dipersepsikan sebagai agenda eksklusif Fretilin. Karena itu, sejak awal dekade 1980-an ia mulai mendorong reorganisasi gerakan perlawanan dengan menempatkan persatuan nasional sebagai tujuan utama. Proses reorganisasi ini diawali melalui restrukturisasi gerakan perlawanan pada 1981, tetapi mencapai titik balik ketika Xanana memutuskan melepaskan Falintil dari afiliasi Partai Fretilin dan mengembangkannya sebagai kekuatan nasional yang terbuka bagi seluruh rakyat Timor-Leste, meskipun ide ini pada awalnya sempat mendapatkan tentangan keras dari para pimpinan Fretilin yang saat itu berada di Mozambik (Pinto, 2015). Sarah Niner menilai perubahan tersebut sebagai inovasi politik paling penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Timor-Leste karena untuk pertama kalinya perjuangan bersenjata diposisikan sebagai milik bangsa, bukan milik satu organisasi politik (Niner, 2000).

Keputusan menjadikan Falintil sebagai kekuatan non-partisan memiliki implikasi yang jauh melampaui aspek organisasi militer. Dengan dilepaskannya Falintil dari identitas eksklusif Fretilin, ruang politik mulai terbuka bagi kelompok-kelompok yang sebelumnya berada di luar orbit partai tersebut untuk bergabung dalam perjuangan kemerdekaan (Pinto, 2015). Michael Leach menunjukkan bahwa perubahan ini menandai pergeseran dari nasionalisme yang bersifat ideologis menuju nasionalisme yang dibangun di atas proyek

kebangsaan bersama (*national project*), sehingga perlawanan tidak lagi didefinisikan oleh afiliasi politik, melainkan oleh komitmen terhadap kemerdekaan Timor-Leste. Dalam pembacaan saya, perubahan inilah yang mengawali transformasi Maubereisme dari identitas revolusioner menjadi narasi kebangsaan yang mampu melampaui batas-batas partai politik (Mohammad, 2023a).

Perubahan strategi tersebut kemudian membuka jalan bagi rekonsiliasi dengan kelompok-kelompok yang sebelumnya memiliki hubungan tegang dengan Fretilin, terutama União Democrática Timorense (UDT) dan Gereja Katolik. Pada masa dekolonisasi, hubungan Fretilin dengan Gereja tidak selalu harmonis karena sebagian program politik Fretilin dipandang terlalu dipengaruhi gagasan kiri dan mengkritik posisi historis Gereja dalam struktur kolonial Portugis. Melissa Johnston mencatat bahwa dalam dokumen-dokumen awalnya, Fretilin bahkan menegaskan perlunya pemisahan yang jelas antara Gereja dan negara, suatu gagasan yang ketika itu menimbulkan kecurigaan di kalangan hierarki Gereja Katolik. Namun pengalaman panjang menghadapi pendudukan Indonesia secara bertahap mengubah konfigurasi tersebut. Musuh bersama menciptakan ruang dialog baru yang sebelumnya sulit dibayangkan, sehingga perbedaan ideologis mulai dikesampingkan demi tujuan yang lebih besar, yaitu mempertahankan eksistensi bangsa Timor-Leste (Pinto, 2015).

Peranan Gereja Katolik dalam fase ini menjadi semakin menentukan. Di bawah kepemimpinan Uskup Martinho da Costa Lopes, dan kemudian Uskup Carlos Filipe Ximenes Belo, Gereja tidak hanya menjalankan fungsi pastoral, tetapi juga berkembang menjadi pelindung masyarakat sipil dan salah satu saluran diplomasi internasional bagi perjuangan kemerdekaan (Pinto, 2015). Peter Carey menunjukkan bahwa penolakan Gereja Timor-Timur untuk diintegrasikan ke dalam struktur Konferensi Waligereja Indonesia merupakan simbol penting bahwa Gereja mempertahankan identitasnya yang terpisah dari administrasi negara Indonesia (Carey, 2007).

Pada saat yang sama, penggunaan bahasa Tetun dalam liturgi turut memperkuat posisi bahasa tersebut sebagai bahasa pemersatu nasional, meskipun tujuan awalnya bukanlah membangun nasionalisme, namun secara tidak sengaja turut mempersatukan berbagai suku yang berbeda (Mohammad, *unpublished script*). Timor Timur sendiri berbeda dengan Timor Barat yang relatif homogen, sebab Timor Timur sendiri memiliki keberagaman etnis dan bahasa yang berbeda dengan Timor Barat (Satianegara, 1993)—hal yang sering tidak disadari oleh pemangku kebijakan di Indonesia. Dengan demikian, Gereja secara tidak langsung berkontribusi pada pembentukan narasi kebangsaan yang bertumpu pada bahasa dan pengalaman sejarah bersama, bukan pada identitas keagamaan semata (Hull, 2001).

Transformasi itu mencapai bentuk kelembagaan ketika Xanana Gusmão mendirikan Conselho Nacional da Resistência Maubere atau Dewan Nasional Perlawanan Maubere (CNRM) pada 1987 sebagai organisasi payung yang menghimpun berbagai unsur perlawanan, meniru konsep Palestine Liberation Front atau Front Pembebasan Palestina (PLO). Berbeda dengan Fretilin, CNRM sejak awal dirancang sebagai front nasional yang menaungi kekuatan bersenjata (Falintil), jaringan bawah tanah, gerakan diplomasi internasional, serta berbagai kelompok politik seperti Partai Fretilin dan UDT, serta organisasi sosial yang mendukung kemerdekaan (Pinto, 2015). José Ramos-Horta menjalankan fungsi diplomasi internasional, sementara jaringan perjuangan kemerdekaan di dalam negeri diperluas melalui kerja sama yang semakin erat dengan unsur-unsur Gereja, organisasi masyarakat, dan kelompok nasionalis lainnya. Sarah Niner menyebut lahirnya CNRM sebagai titik ketika strategi non-partisan mulai matang dan menghasilkan basis legitimasi yang jauh lebih luas daripada sebelumnya (Niner, 2000).

Perluasan basis perjuangan tersebut kemudian disempurnakan melalui perubahan CNRM menjadi Conselho Nacional de Resistência Timorese atau Dewan Nasional Perlawanan Timor (CNRT) pada 1998. Penghapusan istilah *Maubere* dari nama organisasi bukan berarti meninggalkan warisan Maubereisme, melainkan menunjukkan bahwa simbol perjuangan telah berkembang menjadi milik seluruh bangsa Timor-Leste, termasuk kelompok-kelompok yang sebelumnya keberatan dengan istilah tersebut karena asosiasinya dengan Fretilin (Niner, 2000). CNRT memberi ruang bagi partai-partai politik, organisasi keagamaan, kelompok budaya, dan unsur masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dalam satu front nasional yang lebih inklusif. Dengan demikian, yang diwariskan kepada negara Timor-Leste menjelang Referendum Kemerdekaan Timor Timur 1999 yang diselenggarakan oleh PBB bukan hanya kemenangan diplomatik, tetapi juga sebuah narasi kebangsaan yang telah melampaui identitas organisasi pendirinya.

Dengan demikian, periode 1975–2002 menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan Timor-Leste tidak hanya menghasilkan pembebasan dari pendudukan Indonesia, tetapi juga mentransformasikan Maubereisme dari ideologi sebuah gerakan menjadi narasi kebangsaan yang mampu menyatukan aktor-aktor dengan latar belakang politik, agama, dan sosial yang berbeda (Mohammad, 2023b). Transformasi inilah yang kemudian diwarisi oleh republik baru setelah kemerdekaan. Oleh karena itu, tantangan pada periode berikutnya tidak lagi berpusat pada upaya merebut negara, melainkan pada bagaimana mempertahankan narasi kebangsaan tersebut sebagai fondasi penyelenggaraan negara. Dari sinilah pembahasan beralih kepada pembahasan berikutnya, yaitu bagaimana sekularisme berkembang menjadi konsensus politik para *founding fathers* Timor-Leste.

Perjuangan Mempertahankan Maubereisme sebagai Narasi Kebangsaan (2002–2008): Sekularisme sebagai Konsensus Politik Para *Founding Fathers*

A luta continua! Jika pada masa perjuangan kemerdekaan tantangan utama para *founding fathers* adalah membangun narasi kebangsaan yang mampu menyatukan masyarakat Timor-Leste, maka setelah republik berdiri tantangan tersebut berubah menjadi mempertahankan narasi itu sebagai dasar penyelenggaraan negara (Dunn, 2003). Michael Leach menunjukkan bahwa persoalan terbesar Timor-Leste setelah memperoleh kemerdekaan bukan lagi merebut kedaulatan, melainkan membangun kohesi nasional (*nation-building*) di tengah masyarakat yang mewarisi pengalaman kolonialisme, pendudukan, dan konflik politik yang panjang (Leach, 2017).

Perubahan tantangan tersebut mempunyai arti yang mendasar. Selama masa perjuangan kemerdekaan, Maubereisme berhasil berkembang dari identitas politik Fretilin menjadi narasi kebangsaan yang mempersatukan berbagai unsur perjuangan melalui CNRM dan kemudian CNRT. Namun, setelah negara berdiri, narasi tersebut tidak lagi cukup dipertahankan sebagai memori kolektif perjuangan. Ia harus diterjemahkan menjadi kesepakatan politik yang mampu menjaga republik tetap utuh meskipun para elite kembali bersaing dalam arena demokrasi. Dalam pengertian inilah perjuangan setelah 2002 tidak lagi berorientasi pada pembentukan bangsa (*nation formation*), melainkan pada pemeliharaan konsensus kebangsaan (*nation-building*) (Leach, 2017).

Kesadaran tersebut tercermin secara jelas dalam Pembukaan Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste Tahun 2002. Alih-alih hanya mendeklarasikan berdirinya negara baru, para penyusun konstitusi memilih menempatkan sejarah perjuangan nasional sebagai sumber legitimasi republik. Pembukaan konstitusi menyatakan bahwa perjuangan yang mula-mula dipimpin oleh Fretilin kemudian berkembang menjadi perjuangan seluruh bangsa melalui pembentukan Conselho Nacional da Resistência Maubere (CNRM) pada 1987 dan Conselho Nacional da Resistência Timorense (CNRT) pada 1998. Dengan demikian, konstitusi secara simbolik mengakui bahwa kemerdekaan merupakan hasil kerja kolektif berbagai kekuatan politik dan sosial, bukan kemenangan satu organisasi semata (Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste, 2002).

Pilihan tersebut memperlihatkan bahwa pengalaman perjuangan kemerdekaan dijadikan fondasi moral bagi negara yang baru lahir. Konstitusi memberikan penghormatan kepada tiga front perjuangan—baik perjuangan bersenjata, bawah tanah, dan diplomatik—serta mengakui peranan Gereja Katolik dalam membela martabat rakyat Timor-Leste selama masa pendudukan. Pengakuan tersebut bukan sekadar penghormatan historis, tetapi juga upaya membangun memori kolektif yang dapat diterima oleh berbagai kelompok yang sebelumnya berasal dari latar belakang politik yang berbeda. Dalam kajian

mengenai identitas nasional Timor-Leste, Leach menilai bahwa penggunaan memori perjuangan sebagai dasar legitimasi negara merupakan salah satu mekanisme penting untuk membangun identitas nasional yang melampaui loyalitas terhadap partai politik (Leach, 2017).

Namun demikian, para *founding fathers* tidak berhenti pada pengakuan terhadap sejarah perjuangan. Mereka juga harus menjawab pertanyaan yang jauh lebih sulit: di atas prinsip apakah republik akan diselenggarakan? Jawaban yang mereka pilih bukanlah negara yang didasarkan pada identitas agama tertentu, melainkan negara yang menghormati agama sekaligus menjaga netralitas politik negara terhadap seluruh komunitas keagamaan. Karena itu, Konstitusi Timor-Leste menjamin kebebasan beragama sekaligus menegaskan pemisahan antara negara dan lembaga-lembaga keagamaan melalui Pasal 45. Dalam konteks ini, sekularisme tidak dirancang untuk mengurangi peranan agama dalam kehidupan masyarakat, melainkan untuk memastikan bahwa republik tetap menjadi milik seluruh warga negara tanpa memandang identitas keagamaannya (Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste, 2002).

Pilihan tersebut memperlihatkan bahwa para *founding fathers* tidak memandang penghormatan terhadap Gereja Katolik dan prinsip negara sekuler sebagai dua gagasan yang saling bertentangan. Gereja memperoleh tempat terhormat karena kontribusinya dalam perjuangan kemerdekaan, sementara negara mempertahankan posisi netral agar republik tidak berubah menjadi negara yang mewakili satu agama tertentu. Dengan demikian, sekularisme di Timor-Leste lebih tepat dipahami sebagai konsensus politik yang lahir dari pengalaman perjuangan bersama daripada sebagai proyek sekularisasi yang bertujuan membatasi agama dalam ruang publik (Mohammad, 2023a). Pembacaan ini juga sejalan dengan argumentasi Leach bahwa pembangunan negara Timor-Leste bertumpu pada kemampuan elite mempertahankan identitas nasional yang inklusif di tengah berbagai garis pemisah politik dan sosial (Leach, 2017).

Konsensus politik tersebut, bagaimanapun, segera menghadapi ujian pertamanya. Krisis yang muncul pada 2005–2006 memperlihatkan bahwa narasi kebangsaan yang telah dilembagakan melalui konstitusi tidak cukup dipertahankan dalam tataran normatif, tetapi harus diuji dalam praktik kompetisi politik sehari-hari. Oleh karena itu, pembahasan berikut tidak lagi berfokus pada bagaimana narasi kebangsaan dilembagakan melalui Konstitusi 2002, melainkan pada bagaimana para *founding fathers* mempertahankan konsensus tersebut ketika republik menghadapi ketegangan antara negara, Gereja Katolik, dan elite politik pascakemerdekaan.

Konsensus politik tersebut, bagaimanapun, segera menghadapi ujian pertamanya. Sejak beberapa tahun awal kemerdekaan, republik dihadapkan pada serangkaian krisis yang memperlihatkan bahwa narasi kebangsaan yang telah

dilembagakan melalui Konstitusi 2002 tidak cukup dipertahankan dalam tataran normatif, tetapi juga harus diuji dalam praktik politik sehari-hari. Ujian tersebut mula-mula muncul melalui ketegangan antara negara dan Gereja Katolik pada 2005, kemudian berkembang menjadi krisis politik dan keamanan yang lebih luas pada 2006 ketika pembelahan antara kelompok *lorosa'e* (Timor-Leste bagian timur) dan *loromonu* (Timor-Leste bagian barat) merembet ke tubuh militer, kepolisian, dan elite politik nasional (International Crisis Group, 2008).

Krisis 2006 bermula dari petisi ratusan prajurit F-FDTL yang mengaku mengalami diskriminasi berdasarkan asal-usul regional. Setelah hampir 600 prajurit diberhentikan dari dinas militer, demonstrasi di Dili berkembang menjadi kekerasan yang melibatkan militer, kepolisian, kelompok sipil, serta elite politik. Situasi semakin memburuk ketika F-FDTL dikerahkan untuk menangani krisis keamanan, sebuah langkah yang memicu kontroversi politik dan memperuncing hubungan antara Perdana Menteri Mari Alkatiri dan Presiden Xanana Gusmão. Dinamika politik pada periode tersebut didokumentasikan secara rinci dalam film dokumenter *Timor Gap Widens* (2006) yang diproduksi SBS Australia pada 2006. Dokumenter tersebut kemudian diunggah kembali oleh Journeyman Pictures di YouTube dengan judul *Raise Your Hand For Alkatiri: An Insight Into East Timorese Politics* (2016), yang memuat rekaman langsung mengenai Kongres Fretilin, demonstrasi di Dili, hingga eskalasi krisis politik yang berujung pada pengunduran diri Mari Alkatiri.

Oleh karena itu, pembahasan berikut tidak lagi berfokus pada bagaimana narasi kebangsaan dilembagakan melalui Konstitusi 2002, melainkan pada bagaimana para *founding fathers* mempertahankan konsensus tersebut ketika republik menghadapi ketegangan antara negara, Gereja Katolik, militer, dan elite politik pada tahun-tahun awal pascakemerdekaan.

Ujian pertama terhadap konsensus tersebut justru datang dari hubungan antara negara dan Gereja Katolik. Hubungan yang selama masa pendudukan Indonesia berkembang menjadi salah satu pilar utama gerakan perjuangan kemerdekaan kembali mengalami ketegangan setelah republik berdiri. Akan tetapi, ketegangan tersebut bukan disebabkan oleh penolakan Gereja terhadap kemerdekaan Timor-Leste, melainkan oleh perbedaan pandangan mengenai posisi agama dalam ruang publik setelah negara merdeka. Persoalan inilah yang kemudian memunculkan demonstrasi besar pada tahun 2005 dan menjadi krisis politik pertama yang menguji kemampuan para *founding fathers* mempertahankan konsensus kebangsaan.

Untuk memahami mengapa demonstrasi tersebut begitu sensitif, perlu diingat bahwa hubungan antara Gereja Katolik dan Fretilin pada masa dekolonisasi tidak selalu harmonis (Aditjondro, 2000). Pada 1974–1975 Fretilin mengusung gagasan pemisahan antara negara dan agama sebagai bagian dari proyek pembentukan negara modern. Dalam sejumlah dokumen politiknya,

Fretilin juga mengkritik kedekatan sebagian institusi Gereja dengan struktur kolonial Portugis. Jill Jolliffe mencatat bahwa sikap tersebut sempat menimbulkan kecurigaan di kalangan hierarki Gereja, meskipun kedua pihak sama-sama mendukung kemerdekaan Timor-Leste.

Situasi tersebut berubah secara bertahap setelah invasi Indonesia pada 7 Desember 1975. Pendudukan yang berlangsung hampir seperempat abad justru mempertemukan kembali Gereja Katolik dan gerakan perjuangan kemerdekaan dalam satu pengalaman perjuangan bersama. Peter Carey menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinan Uskup Martinho da Costa Lopes dan kemudian Uskup Carlos Filipe Ximenes Belo, Gereja berkembang menjadi salah satu institusi yang paling konsisten membela hak-hak rakyat Timor-Leste selama masa pendudukan (Carey, 2007).

Júlio Tomás Pinto menambahkan bahwa Gereja tidak hanya berperan dalam advokasi hak asasi manusia, tetapi juga ikut mempertahankan identitas nasional Timor-Leste melalui penggunaan bahasa Tetun dalam liturgi serta keputusannya untuk tetap berada di bawah yurisdiksi Vatikan, bukan bergabung ke dalam struktur Gereja Katolik Indonesia. Dalam perspektif Pinto, pilihan tersebut memperkuat posisi Gereja sebagai bagian dari perjuangan nasional, bukan sebagai instrumen integrasi politik Indonesia (Pinto, 2015).

Pengalaman perjuangan kemerdekaan bersama itulah yang menjelaskan mengapa setelah kemerdekaan hubungan negara dan Gereja tidak pernah dipahami sebagai hubungan yang saling meniadakan. Sebaliknya, kedua institusi sama-sama menganggap diri mereka memiliki tanggung jawab moral terhadap masa depan republik. Ketika pemerintah Mari Alkatiri pada awal 2005 memutuskan untuk mengubah pendidikan agama di sekolah negeri dari mata pelajaran inti menjadi mata pelajaran pilihan di luar kurikulum utama, sebagian besar hierarki Gereja memandang kebijakan tersebut sebagai pengurangan terhadap peranan agama dalam kehidupan publik. Pemerintah Amerika Serikat dalam *International Religious Freedom Report 2005* mencatat bahwa kebijakan itu memicu perdebatan publik paling besar sejak kemerdekaan dan mendorong dua uskup Timor-Leste mengorganisasi demonstrasi yang berlangsung hampir tiga minggu.

Demonstrasi tersebut diikuti sekitar sepuluh ribu peserta dan menjadi mobilisasi massa terbesar sejak Timor-Leste memperoleh kemerdekaan pada 2002. Selain menuntut agar pendidikan agama dikembalikan ke dalam kurikulum inti, sebagian demonstran juga menyerukan pengunduran diri Perdana Menteri Mari Alkatiri. Namun demikian, substansi konflik sebenarnya lebih kompleks daripada sekadar persoalan kurikulum sekolah. Melissa Johnston menunjukkan bahwa posisi Mari Alkatiri sebagai seorang Muslim keturunan Arab turut memengaruhi cara sebagian aktor politik membaca konflik tersebut,

sehingga isu pendidikan agama kemudian bercampur dengan kontestasi identitas dan persaingan elite politik (Johnston, 2012).

Meskipun ketegangan politik meningkat, krisis tersebut tidak berkembang menjadi tuntutan untuk mengubah Timor-Leste menjadi negara Katolik. Sebaliknya, penyelesaiannya ditempuh melalui kompromi konstitusional. Pemerintah dan para uskup akhirnya menandatangani deklarasi bersama pada 7 Mei 2005 yang mengembalikan pendidikan agama ke dalam kurikulum reguler, tetapi keikutsertaan siswa tetap bergantung pada pilihan orang tua. Deklarasi tersebut juga membentuk kelompok kerja permanen yang mempertemukan pemerintah, Gereja Katolik, dan komunitas agama lainnya sebagai forum konsultasi kebijakan (Joint Declaration of Church and Timor Government, 2005).

Dalam pembacaan artikel ini, kompromi tersebut memperlihatkan bahwa baik pemerintah maupun Gereja memilih mempertahankan kerangka republik yang telah dibangun sejak kemerdekaan. Pemerintah tidak meninggalkan prinsip sekularisme, sementara Gereja tidak menuntut perubahan dasar konstitusional negara. Dengan demikian, demonstrasi 2005 bukan menjadi bukti kegagalan konsensus sekularisme, melainkan justru menunjukkan bahwa konsensus tersebut mampu menyediakan ruang negosiasi ketika negara menghadapi krisis politik pertamanya. Dari titik inilah ujian berikutnya muncul, yakni ketika krisis politik 2006 mempertemukan kembali persoalan identitas, kepemimpinan, dan masa depan narasi kebangsaan Timor-Leste (Johnston, 2012).

Kompromi antara pemerintah dan Gereja pada 2005 memang berhasil meredakan demonstrasi, tetapi konsensus politik yang menopang republik belum sepenuhnya aman. Setahun kemudian Timor-Leste justru menghadapi krisis yang jauh lebih besar. Perselisihan di tubuh angkatan bersenjata, pemecatan sekitar 600 prajurit (*petitioners*), serta meningkatnya rivalitas di kalangan elite berkembang menjadi krisis keamanan nasional yang mengguncang legitimasi negara muda tersebut. Michael Leach menilai bahwa krisis 2006 menjadi ujian paling serius terhadap proses *nation-building* yang baru dimulai setelah kemerdekaan karena memperlihatkan rapuhnya kohesi politik dan kelembagaan republik (Leach, 2017).

Dalam perkembangan berikutnya, krisis tersebut tidak hanya dipahami sebagai persoalan keamanan. Berbagai media internasional juga menyoroti identitas pribadi Perdana Menteri Mari Alkatiri sebagai seorang Muslim keturunan Arab-Hadhrami yang memimpin negara dengan penduduk yang mayoritas beragama Katolik. Pemberitaan semacam itu kemudian memunculkan kesan seolah-olah krisis politik Timor-Leste merupakan konflik antara identitas Islam dan Katolik. Melissa Johnston menunjukkan bahwa pembacaan tersebut terlalu menyederhanakan kenyataan politik Timor-Leste karena faktor utama krisis tetap berkaitan dengan persaingan elite, persoalan keamanan, dan fragmentasi politik pascakemerdekaan, bukan konflik teologis.

Johnston juga memperlihatkan bahwa identitas Arab-Muslim Alkatiri memang dijadikan bahan mobilisasi politik oleh sebagian lawannya, terutama setelah demonstrasi Gereja tahun 2005. Akan tetapi, penggunaan identitas tersebut lebih merupakan strategi delegitimasi terhadap kepemimpinan Alkatiri daripada upaya untuk mengubah dasar konstitusional republik. Dengan kata lain, agama menjadi bagian dari retorika politik, tetapi tidak berkembang menjadi proyek untuk mendirikan negara Katolik ataupun menolak prinsip negara sekuler.

Meskipun identitas agama sempat dimobilisasi dalam retorika politik selama krisis 2005–2006, para pemimpin Timor-Leste berupaya memastikan bahwa konflik tersebut tidak berkembang menjadi konflik antarumat beragama. Upaya tersebut menjadi penting karena pada masa kerusuhan 2006 sebagian komunitas Muslim di Dili kembali mengalami intimidasi dan serangan massa sehingga ratusan warga mencari perlindungan di kompleks Masjid An-Nur pada saat bulan Ramadhan. Berbagai laporan mengenai kebebasan beragama mencatat bahwa ketegangan politik pada masa itu memang berdampak terhadap rasa aman komunitas Muslim, meskipun pemerintah tetap berupaya menjaga perlindungan terhadap kelompok agama minoritas.

Dalam situasi tersebut, José Ramos-Horta secara terbuka mengecam aksi kekerasan terhadap komunitas Muslim, di bulan suci Ramadhan dan menolak berkembangnya radikalisme agama di Timor-Leste. Bagi Ramos-Horta, konflik politik tidak boleh dijadikan alasan untuk menyerang kelompok agama tertentu ataupun merusak fondasi pluralisme yang telah dibangun sejak perjuangan kemerdekaan (Horta, 2006). Sikap tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah memandang perlindungan terhadap komunitas Muslim sebagai bagian dari tanggung jawab negara, bukan sekadar persoalan hubungan antaragama.

Sikap untuk mempertahankan toleransi dan pluralisme agama di Timor-Leste telah tampak sejak masa transisi kemerdekaan (1999–2002). Setelah referendum 1999 muncul kekhawatiran bahwa komunitas Muslim di Kampung Alor akan menjadi sasaran balas dendam karena sebagian anggotanya dipersepsikan sebagai pendukung Integrasi dan dianggap dekat dengan Indonesia, karena kesamaan agama. Dalam situasi tersebut, Uskup Carlos Filipe Ximenes Belo mendatangi Masjid An-Nur dan menyatakan bahwa apabila ada pihak yang berusaha menyerang umat Islam ataupun membakar masjid, ia sendiri akan datang membela mereka. Sikap Belo menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan tidak dipahami sebagai kemenangan satu komunitas agama atas komunitas lainnya, melainkan sebagai perjuangan membangun republik yang melindungi seluruh warga negara tanpa membedakan keyakinan (Tirto, 2019).

Komitmen tersebut tidak berhenti pada figur Belo. Setelah kerusuhan Desember 2002 yang menyebabkan Masjid An-Nur mengalami kerusakan,

Uskup Basílio do Nascimento secara terbuka meminta maaf kepada komunitas Muslim atas keterlibatan sebagian umat Katolik dalam kerusuhan tersebut. Ia juga menawarkan penggunaan stasiun radio Gereja untuk menyiarkan khutbah Jumat dan membuka ruang dialog antara seminari Katolik dengan tokoh-tokoh Muslim. Langkah tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap komunitas agama minoritas tidak hanya bergantung pada sikap personal seorang uskup, tetapi mulai menjadi bagian dari praktik rekonsiliasi yang dijalankan institusi Gereja Katolik di Timor-Leste (CNS, 2002).

Perkembangan politik setelah pengunduran diri Mari Alkatiri rupanya tidak mengubah komitmen para *founding fathers* Timor-Leste terhadap narasi kebangsaan mereka dan mereka tetap komit pada sekularisme. Terlihat jelas ketika José Ramos-Horta kemudian memimpin sebagai Perdana Menteri Timor-Leste pasca Mari Alkatiri, ia tidak berupaya mengubah desain hubungan antara negara dan agama yang telah disepakati sejak 2002. Pemerintah tetap mengakui kontribusi historis Gereja Katolik, namun pada saat yang sama mempertahankan prinsip bahwa negara tidak boleh diidentikkan dengan satu agama tertentu. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pergantian elite tidak diikuti oleh perubahan terhadap konsensus dasar yang menopang republik.

Sikap serupa juga tampak pada pemerintahan Xanana Gusmão setelah pemilu 2007. Meskipun memperoleh legitimasi politik yang kuat sebagai tokoh utama perjuangan kemerdekaan, Xanana tidak menggunakan posisinya untuk membangun pemerintahan yang berlandaskan identitas keagamaan. Sebaliknya, ia mempertahankan praktik pemerintahan yang bersifat inklusif dan membuka ruang bagi tokoh-tokoh dari latar belakang yang berbeda untuk menduduki jabatan strategis. Dalam pembacaan Michael Leach, keberlanjutan tersebut merupakan bagian dari upaya elite Timor-Leste menjaga kohesi nasional di tengah kompetisi politik yang semakin terbuka.

Salah satu contoh yang menarik ialah pengangkatan Júlio Tomás Pinto sebagai Menteri Pertahanan. Pinto merupakan warga Timor-Leste beragama Islam yang pernah menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang dan aktif dalam lingkungan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) ketika belajar di Indonesia. Identitas keagamaannya tidak menjadi hambatan untuk menduduki salah satu posisi paling strategis dalam kabinet. Bahkan dalam kunjungannya ke Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada 2008, Pinto menegaskan bahwa Timor-Leste adalah negara sekuler yang tetap menjamin perlakuan setara bagi seluruh agama dalam bidang pendidikan maupun pelayanan publik. Pernyataan tersebut diberitakan secara luas oleh media-media ataupun website yang berafiliasi kepada Muhammadiyah, juga diberitakan di sejumlah media nasional Indonesia. Hal ini lantas menjadi ilustrasi konkret mengenai cara elite Timor-Leste memahami sekularisme sebagai prinsip kesetaraan warga negara, bukan sebagai penolakan terhadap agama.

Dalam perspektif artikel ini, keberadaan Júlio Tomás Pinto memiliki makna yang melampaui simbol representasi seorang Muslim dalam kabinet. Pengangkatannya menunjukkan bahwa setelah krisis 2005–2006 para *founding fathers* tetap mempertahankan satu batas yang tidak mereka lampau, yakni menjadikan identitas agama sebagai dasar eksklusif pembentukan negara. Persaingan politik berlangsung mengenai koalisi, kepemimpinan, maupun arah pembangunan nasional, tetapi tidak berkembang menjadi tuntutan untuk mendefinisikan ulang republik berdasarkan agama tertentu.

Dengan demikian, periode 2005–2008 memperlihatkan bahwa sekularisme di Timor-Leste memperoleh daya tahannya bukan karena negara berhasil menghilangkan konflik politik, melainkan karena para elite tetap mempertahankan konsensus mengenai batas-batas kompetisi politik. Pengalaman perjuangan bersama selama masa perjuangan kemerdekaan menyediakan narasi kebangsaan yang cukup kuat untuk mencegah konflik elite berubah menjadi konflik agama. Dalam pengertian inilah sekularisme lebih tepat dipahami sebagai hasil *political settlement* para *founding fathers* daripada sekadar norma yang tertulis dalam konstitusi. Justru dari fondasi politik tersebut, Timor-Leste kemudian memasuki tantangan baru setelah 2008, yaitu bagaimana mempertahankan narasi kebangsaan ketika republik mulai berhadapan dengan masuknya norma-norma global mengenai hak asasi manusia dan non-diskriminasi.

Perjuangan Meneguhkan Narasi Kebangsaan (2008–Sekarang): Dari Sekularisme Menuju Ruang Politik bagi LGBT

A luta continua! Jika periode 2002–2008 memperlihatkan bagaimana para *founding fathers* mempertahankan narasi kebangsaan di tengah krisis politik domestik, maka fase berikutnya ditandai oleh tantangan yang berbeda. Setelah stabilitas politik relatif pulih pascakrisis 2006–2008, perhatian negara secara bertahap bergeser dari konsolidasi keamanan menuju penguatan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan pembangunan institusi sipil (Leach, 2017). Elfie Shiosaki juga menunjukkan bahwa setelah konflik regionalisme 2006 mereda, tantangan *nation-building* Timor-Leste tidak lagi semata-mata berkaitan dengan stabilitas politik, tetapi juga dengan kemampuan republik membangun identitas nasional yang mampu mengatasi berbagai garis pemisah sosial yang masih tersisa (Shiosaki, 2017).

Perubahan orientasi tersebut membuka ruang bagi masuknya berbagai norma internasional yang sebelumnya belum menjadi bagian penting dalam perdebatan politik nasional. Namun, norma-norma baru tersebut tidak hadir dalam ruang yang kosong. Sejak awal kemerdekaan, Konstitusi Timor-Leste telah menjamin persamaan kedudukan seluruh warga negara di hadapan hukum serta

melarang berbagai bentuk diskriminasi. Prinsip tersebut kemudian diperkuat melalui keterlibatan aktif Timor-Leste dalam berbagai mekanisme hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai bagian dari strategi memperkuat legitimasi internasional negara yang baru merdeka.

Dalam perspektif *norm life cycle*, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai tahap *norm emergence*, yaitu fase ketika norma baru mulai diperkenalkan melalui kerja sama antara *norm entrepreneurs*, organisasi internasional, dan aktor-aktor domestik (Finnemore & Sikkink, 1998). Pada tahap ini belum terjadi perubahan besar dalam kebijakan negara. Yang berlangsung justru pembangunan ruang diskusi melalui penelitian, pendidikan publik, pelatihan hak asasi manusia, dan pembentukan jejaring advokasi. Berbagai lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa mulai bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil Timor-Leste dalam isu kesetaraan, inklusi sosial, dan perlindungan kelompok rentan. Laporan OHCHR mengenai akses pendidikan bagi pelajar LGBT menjadi salah satu contoh bagaimana isu tersebut mulai diperkenalkan melalui pendekatan pendidikan dan hak asasi manusia, bukan melalui konfrontasi politik.

Yang menarik, proses tersebut berlangsung sejalan dengan arah pembangunan negara yang sedang ditempuh Timor-Leste. UNDP memandang demokrasi yang inklusif, tata kelola pemerintahan yang akuntabel, serta kesetaraan sosial sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka panjang negara pascakonflik. Karena itu, berbagai kerja sama internasional mengenai kelompok rentan tidak diposisikan sebagai agenda yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari proyek pembangunan demokrasi yang lebih luas (UNDP, 2022).

Dalam pembacaan artikel ini, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa tantangan narasi kebangsaan kembali berubah. Jika pada periode 1975–2002 ancaman utama berasal dari kolonialisme dan pendudukan, sedangkan pada periode 2002–2008 berasal dari konflik elite domestik, maka setelah 2008 tantangan baru muncul melalui masuknya norma-norma global mengenai hak asasi manusia dan non-diskriminasi. Dengan demikian, persoalan pokoknya bukan lagi apakah Timor-Leste akan menerima atau menolak norma baru tersebut, melainkan bagaimana norma itu diterjemahkan agar tetap sejalan dengan narasi kebangsaan yang telah dibangun sejak masa perjuangan kemerdekaan (Mohammad, 2023a).

Pertanyaan berikutnya ialah: siapa yang membawa norma baru tersebut ke dalam ruang politik Timor-Leste? Dalam kerangka *norm life cycle*, Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink menyebut aktor-aktor tersebut sebagai *norm entrepreneurs*, yaitu individu maupun organisasi yang secara aktif memperkenalkan norma baru serta berupaya membangun legitimasi sosial dan politik bagi norma tersebut (Finnemore & Sikkink, 1998). Yanapon Musiket

menunjukkan bahwa proses tersebut di Timor-Leste tidak dimulai oleh negara, melainkan oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil yang membangun jejaring dengan lembaga internasional dan kemudian memperoleh dukungan elite politik domestik.

Salah satu organisasi yang paling awal memainkan peranan tersebut ialah Coalition on Diversity and Action (CODIVA). Alih-alih membingkai perjuangannya sebagai gerakan identitas yang berhadapan dengan negara atau agama, CODIVA sejak awal menempatkan isu orientasi seksual dan identitas gender dalam kerangka hak asasi manusia, kesetaraan warga negara, dan penghapusan diskriminasi. Pendekatan tersebut memungkinkan organisasi ini membangun komunikasi dengan lembaga negara, jaringan perempuan, serta berbagai organisasi masyarakat sipil tanpa menempatkan isu LGBT sebagai antitesis terhadap identitas nasional Timor-Leste. Musiket menilai strategi tersebut menjadi salah satu faktor penting yang membuat advokasi LGBT di Timor-Leste berkembang secara bertahap, bukan melalui konfrontasi langsung.

Peran tersebut kemudian dilengkapi oleh Arco Iris Timor-Leste, yang sejak 2017 berkembang sebagai organisasi yang secara khusus berfokus pada advokasi komunitas LGBT. Berbeda dengan pendekatan yang menitikberatkan pada mobilisasi politik, Arco Iris lebih banyak membangun ruang aman (*safe space*), pendidikan publik, dan koalisi lintas organisasi masyarakat sipil. Program-programnya juga melibatkan organisasi perempuan, kelompok pemuda, dan komunitas hak asasi manusia sehingga isu keberagaman seksual ditempatkan sebagai bagian dari agenda demokrasi dan inklusi sosial yang lebih luas. UN Women bahkan mencatat bahwa Arco Iris menjadi salah satu mitra utama dalam berbagai program penguatan kapasitas organisasi dan advokasi kebijakan mengenai kesetaraan LGBT di Timor-Leste.

Strategi serupa ditempuh oleh Hatutan Youth Council, yang menghubungkan isu keberagaman seksual dengan kesehatan mental, pendidikan, dan partisipasi generasi muda dalam kehidupan demokratis. Dengan pendekatan tersebut, persoalan LGBT tidak diposisikan sebagai agenda eksklusif komunitas tertentu, melainkan sebagai bagian dari perlindungan terhadap kelompok rentan dan perluasan hak-hak kewarganegaraan. Musiket menunjukkan bahwa pendekatan lintas isu seperti inilah yang membuat gerakan LGBT di Timor-Leste lebih mudah diterima oleh berbagai organisasi masyarakat sipil lainnya.

Keberhasilan organisasi-organisasi tersebut tidak dapat dipisahkan dari dukungan berbagai jejaring internasional. Melalui kampanye UN Free & Equal, OHCHR mendorong penelitian mengenai diskriminasi terhadap pelajar LGBT di Timor-Leste sekaligus mengangkat persoalan tersebut sebagai bagian dari agenda hak atas pendidikan. Laporan tersebut menunjukkan bahwa stigma di lingkungan sekolah masih berdampak pada tingginya angka putus sekolah, gangguan kesehatan mental, dan marginalisasi sosial terhadap pelajar LGBT.

Pada saat yang sama, UN Women memperluas kerja sama dengan CODIVA, Arco Iris, dan berbagai organisasi lokal melalui program penguatan kapasitas organisasi, penyusunan kajian kebijakan, serta integrasi isu LGBT ke dalam agenda kesetaraan gender dan pembangunan berkelanjutan. Dalam pandangan UN Women, penguatan hak-hak LGBT di Timor-Leste tidak dipisahkan dari agenda yang lebih luas mengenai *leave no one behind*, sehingga advokasi tersebut berkembang melalui kerja sama, bukan melalui tekanan sepihak terhadap negara.

Penyelenggaraan Dili Pride Parade pada 29 Juni 2017 menjadi salah satu peristiwa paling menarik dalam sejarah politik kontemporer Timor-Leste. Sekitar lima ratus peserta memadati jalan-jalan Kota Dili dalam parade kebanggaan (*Pride Parade*) pertama di negara tersebut. Mereka tidak hanya berasal dari komunitas LGBT, tetapi juga terdiri atas anggota keluarga, organisasi perempuan, kelompok pemuda, organisasi masyarakat sipil, diplomat asing, serta warga heteroseksual yang menyatakan solidaritas terhadap prinsip non-diskriminasi. Pada penyelenggaraan berikutnya, jumlah peserta meningkat hingga sekitar 1.500 orang sehingga memperlihatkan bahwa dukungan publik terhadap parade tersebut berkembang secara bertahap, bukan muncul secara tiba-tiba. Liputan berbagai media internasional kemudian menempatkan Dili Pride Parade sebagai salah satu simbol keterbukaan Timor-Leste terhadap isu keberagaman di Asia Tenggara (VICE, 2019).

Akan tetapi, aspek yang paling menarik dari Dili Pride Parade bukanlah besarnya jumlah peserta, melainkan simbol-simbol yang menyertainya. Sebelum pawai dimulai, para peserta terlebih dahulu mengikuti doa menurut tradisi Katolik dan membuat tanda salib (*sign of the cross*). Seorang biarawati bahkan memimpin doa pembuka sebelum peserta mulai berjalan mengelilingi pusat Kota Dili. Dalam dokumenter VICE—*Pride and Prejudice: LGBTQ Rights in Asia's Newest Nation of Timor-Leste*.

Biarawati tersebut menjelaskan bahwa Gereja Katolik memang tidak mengubah doktrinnya mengenai homoseksualitas, tetapi setiap manusia tetap merupakan ciptaan Tuhan yang harus diperlakukan dengan hormat dan tidak boleh menjadi korban kekerasan maupun diskriminasi. Dengan demikian, simbol-simbol keagamaan tidak tampil sebagai lawan dari gerakan LGBT, melainkan hadir berdampingan dalam ruang publik republik.

Paradoks tersebut merupakan temuan empiris yang penting bagi artikel ini. Seandainya perubahan yang terjadi di Timor-Leste semata-mata merupakan hasil difusi norma internasional, maka simbol-simbol keagamaan kemungkinan besar akan diposisikan sebagai antitesis terhadap gerakan LGBT. Pengalaman Timor-Leste justru menunjukkan pola yang berbeda. Norma mengenai non-diskriminasi dinegosiasikan melalui simbol-simbol yang telah lama memperoleh legitimasi dalam narasi kebangsaan, termasuk penghormatan terhadap Gereja

Katolik sebagai salah satu pilar perjuangan kemerdekaan. Oleh karena itu, yang berlangsung bukanlah pertarungan antara agama dan hak asasi manusia, melainkan proses negosiasi yang memungkinkan keduanya hidup berdampingan dalam ruang publik republik.

Perkembangan tersebut semakin terlihat melalui pernyataan resmi Perdana Menteri Rui Maria de Araújo menjelang penyelenggaraan Dili Pride Parade 2017. Rui menegaskan bahwa setiap warga negara, termasuk anggota komunitas LGBT, memiliki potensi untuk berkontribusi terhadap pembangunan bangsa. Ia juga menyatakan bahwa diskriminasi dan kekerasan tidak memberikan manfaat bagi masa depan Timor-Leste serta mengingatkan bahwa pengalaman perjuangan kemerdekaan telah mengajarkan rakyat Timor-Leste untuk saling menghormati, saling menjaga, dan membangun bangsa secara bersama-sama (Rui Maria de Araújo, 2017).

Bahasa politik yang digunakan Rui Maria de Araújo mempunyai arti yang penting. Ia tidak berbicara mengenai kemenangan gerakan LGBT ataupun kewajiban negara mengikuti rezim hak asasi manusia internasional. Sebaliknya, ia membingkai penghormatan terhadap keberagaman sebagai bagian dari pembangunan bangsa (*nation-building*), martabat manusia, dan cita-cita kemerdekaan yang diperjuangkan bersama. Yang memperoleh legitimasi bukan semata-mata komunitas LGBT sebagai kelompok sosial, melainkan gagasan bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam proyek pembangunan republik. Dengan demikian, norma mengenai non-diskriminasi diterjemahkan ke dalam bahasa politik yang telah lama memperoleh legitimasi dalam narasi kebangsaan Timor-Leste, bukan dipresentasikan sebagai agenda asing yang bertentangan dengan identitas nasional.

Dalam perspektif *norm life cycle*, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa Timor-Leste telah bergerak dari fase *norm emergence* menuju *norm cascade*. Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink menjelaskan bahwa perubahan norma tidak terjadi ketika suatu gagasan pertama kali diperkenalkan, melainkan ketika norma tersebut mulai memperoleh legitimasi dari aktor-aktor negara dan diterima sebagai bagian dari praktik kelembagaan (Finnemore & Sikkink, 1998). Pola tersebut tampak jelas dalam pengalaman Timor-Leste. Organisasi masyarakat sipil seperti CODIVA, Arco Iris, dan Hatutan terlebih dahulu membangun ruang advokasi; jejaring Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian memperkuat proses tersebut; dan akhirnya pemerintah memberikan legitimasi politik terhadap prinsip non-diskriminasi. Dalam konteks inilah Dili Pride Parade 2017 lebih tepat dipahami sebagai titik balik (*tipping point*) menuju *norm cascade*, bukan sebagai titik awal perubahan politik.

Namun demikian, teori Finnemore dan Sikkink belum sepenuhnya menjelaskan mengapa proses tersebut dapat berlangsung relatif damai di Timor-Leste. Dalam pembacaan artikel ini, keberhasilan internalisasi norma tidak

hanya ditentukan oleh efektivitas *norm entrepreneurs* ataupun dukungan organisasi internasional. Faktor yang sama pentingnya ialah keberadaan narasi kebangsaan yang telah memperoleh legitimasi jauh sebelum norma baru tersebut diperkenalkan. Di sinilah konsep nasional-populer (*national-popular*) Antonio Gramsci memberikan penjelasan yang melengkapi teori *norm life cycle*. Maubereisme terlebih dahulu membangun narasi nasional-populer yang menyatukan berbagai identitas sosial, agama, dan politik ke dalam satu proyek kebangsaan. Sekularisme kemudian menjaga agar proyek tersebut tidak direduksi menjadi identitas agama tertentu. Di atas fondasi politik itulah norma mengenai non-diskriminasi memperoleh ruang untuk berkembang tanpa dipersepsikan sebagai ancaman terhadap identitas nasional.

Temuan tersebut sekaligus menjelaskan mengapa negara yang mayoritas penduduknya beragama Katolik dapat menerima penyelenggaraan Dili Pride Parade tanpa harus mengubah dasar konstitusional republik maupun doktrin resmi Gereja Katolik. Oleh karena itu, artikel ini tidak berargumen bahwa sekularisme secara otomatis melahirkan ruang politik bagi komunitas LGBT. Sebaliknya, artikel ini menunjukkan bahwa keberhasilan internalisasi norma baru bergantung pada kemampuan para *founding fathers* membangun dan mempertahankan narasi kebangsaan yang cukup inklusif untuk mengakomodasi perubahan sosial pada periode berikutnya.

Maubereisme menjadi *raison d'être* yang membangun imajinasi mengenai bangsa Timor-Leste sebagai komunitas politik yang melampaui sekat agama dan identitas sosial; sekularisme menjaga agar narasi tersebut tetap menjadi milik seluruh warga negara; dan di atas fondasi itulah norma mengenai non-diskriminasi memperoleh legitimasi politik. Dalam pengertian ini, teori Finnemore dan Sikkink menjelaskan bagaimana norma menyebar, sedangkan Gramsci membantu menjelaskan mengapa norma tersebut dapat diterima dalam konteks historis Timor-Leste. Pembacaan ini sekaligus memperluas argumen bahwa daya tahan narasi kebangsaan yang dibangun sejak masa resistensi merupakan prasyarat bagi kemampuan republik mengakomodasi tantangan-tantangan baru tanpa kehilangan fondasi politiknya (Mohammad, 2023a; 2023b). Dengan demikian, Dili Pride Parade 2017 bukanlah awal sejarah baru Timor-Leste, melainkan salah satu manifestasi historis dari perjalanan panjang *A luta continua!*—perjuangan yang terus berlanjut dalam bentuk yang senantiasa berubah.

KESIMPULAN

Artikel ini menunjukkan bahwa berkembangnya ruang politik bagi komunitas LGBT di Timor-Leste tidak dapat dipahami semata-mata sebagai

konsekuensi konsolidasi demokrasi ataupun keberhasilan difusi norma internasional. Dili Pride Parade 2017 lebih tepat dipahami sebagai manifestasi historis dari proses *nation-building* yang telah berlangsung sejak perjuangan kemerdekaan. Maubereisme membentuk narasi kebangsaan yang mampu melampaui perbedaan politik, agama, dan identitas sosial, sedangkan konsensus sekularisme para *founding fathers* mempertahankan narasi tersebut sebagai fondasi penyelenggaraan negara setelah kemerdekaan. Fondasi inilah yang memungkinkan norma mengenai non-diskriminasi memperoleh legitimasi politik tanpa mengubah dasar konstitusional republik maupun mendorong delegitimasi negara.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa internalisasi norma baru berlangsung melalui proses negosiasi dengan narasi kebangsaan yang telah lebih dahulu memperoleh legitimasi historis, bukan melalui relasi yang bersifat konfrontatif antara agama dan hak asasi manusia. Dalam konteks tersebut, konsep *national-popular* Antonio Gramsci menjelaskan fondasi historis narasi kebangsaan, sedangkan teori *norm life cycle* Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink menjelaskan proses internalisasi norma mengenai non-diskriminasi. Dengan demikian, keberhasilan difusi norma internasional di Timor-Leste sangat dipengaruhi oleh warisan historis *nation-building*, bukan semata-mata oleh aktivitas *norm entrepreneurs* ataupun tekanan organisasi internasional.

Kontribusi utama artikel ini terletak pada upayanya menjembatani kajian *nation-building*, sekularisme, dan difusi norma internasional dalam menjelaskan perkembangan politik kontemporer Timor-Leste. Pengalaman Timor-Leste menunjukkan bahwa kemampuan negara mengakomodasi norma-norma baru tidak terutama ditentukan oleh tingkat religiositas masyarakat ataupun adopsi formal terhadap norma global, melainkan oleh keberhasilan memelihara narasi kebangsaan yang inklusif sejak masa pembentukan negara. Dalam pengertian inilah, *a luta continua!* Tidak lagi sekadar merepresentasikan perjuangan membebaskan Timor-Leste dari kolonialisme dan pendudukan, tetapi juga perjuangan mempertahankan narasi kebangsaan yang memungkinkan republik mengakomodasi norma-norma baru tanpa kehilangan fondasi politik yang diwariskan oleh para *founding fathers*.

DAFTAR PUSTAKA

Aditjondro, G. J. (2000). *Menyongsong Matahari Terbit di Puncak Ramelau: Dampak Pendudukan Timor Lorosa'e dan Munculnya Gerakan Pro-Timor Lorosa'e di Indonesia*. Jakarta: Yayasan HAK dan Fortilos.

- Araújo, Rui Maria de. 2017. *Statement of His Excellency Prime Minister of the Democratic Republic of Timor-Leste on LGBT Acceptance*. Dili: Government of the Democratic Republic of Timor-Leste.
- Bazher, Ambarak A. (1995). *Islam di Timor Timur*. Jakarta: Gema Insani
- Carey, Peter. (1999). The Catholic Church, Religious Revival, and the Nationalist Movement in East Timor, 1975-98. *Indonesia and the Malay World*, 27(78), 77-95.
- CAVR (Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação de Timor-Leste). (2005). *Chega! The Final Report of the CAVR*. Dili: CAVR.
- Dunn, James. (2003). *East Timor: A Rough Passage to Independence*. Double Bay: Longueville Books.
- Finnemore, Martha, and Kathryn Sikkink. 1998. "International Norm Dynamics and Political Change." *International Organization* 52(4): 887-917.
- Freire, Paulo. (1985). *Pendidikan Kaum Tertindas*. Jakarta: LP3ES.
- Gunn, Geoffrey C. (2006). *500 Tahun Timor Loro Sae*. Yogyakarta: Insist Press.
- Hill, Helen M. (2002). *Stirrings in Timor-Leste, 1974-1975: Fretilin, Popular Nationalism and Culture*. Otford: Otford Press.
- Horta, José Ramos-. (1996). *Funu: The Unfinished Saga of East Timor*. Trenton: Red Sea Press.
- <http://www.etan.org/et2003/january/01-04/00cns.htm>
Uskup Dili Basilio do Nascimento meminta maaf kepada umat Muslim atas kerusuhan dan penyerangan Masjid An-Nur. Diakses pada 18 Juli 2026.
- <https://2009-2017.state.gov/j/drl/rls/irf/2005/51510.htm>
Laporan *International Religious Freedom Report 2005*—Kemenlu Amerika Serikat. Diakses pada 18 Juli 2026.
- <https://etan.org/et2002c/december/01-7/06bishop.htm> Uskup Carlos Filipe Ximenes Belo meminta maaf kepada umat Muslim Timor-Leste atas penyerangan terhadap komunitas Muslim Timor-Leste.
- <https://tirto.id/lebaran-terakhir-uskup-belo-tokoh-islam-timor-timur-di-indonesia-d9wy> Diakses pada 18 Juli 2026.

<https://www.etan.org/et2006/october/21/2oetchrs.htm>

Pernyataan Ramos-Horta menentang penyerangan terhadap komunitas Muslim Timor-Leste di bulan Ramadhan. Diakses pada 18 Juli 2026.

<https://www.youtube.com/watch?v=OCmQHkOCeD8&t=226s>

Video

dokumenter *Timor Gap Widens: An in-Depth Look at the Background Behind the Recent Unrest in East Timor* (2006). Video ini diupload di channel *Journeyman Pictures* dengan judul “*Raise Your Hand For Alkatiri: An Insight Into East Timorese Politics*” (2016) Diakses pada 18 Juli 2026.

https://www.youtube.com/watch?v=OMwKX_Ibl40&t=135s

Video dokumenter

yang dibuat oleh *Vice.com* yang berjudul: *Pride and Prejudice: LGBTQ Rights in Asia's Newest Nation of Timor-Leste* (2019) dari channel *Vice Asia*. Diakses pada 18 Juli 2026.

Hull, Geoffrey. (2000). Historical Phonology of Tetum. *Studies in Languages and Cultures of East Timor*, 3, 158–212.

Johnston, Melissa. (2012). A ‘Muslim’ Leader of a ‘Catholic’ Nation? Mari Alkatiri and Timor-Leste’s Islamic Legacy. *Austrian Studies in Anthropology*, Sondernummer 1, hlm. 43–57.

Jolliffe, Jill. (1978). *East Timor: Nationalism and Colonialism*. St. Lucia: University of Queensland Press.

Jornal do Povo Maubere. (1975, 1 November). Edição N.º 6. Editor: Departamento de Informação da FRETILIN. Dili: Imprensa Nacional de Timor-Leste.

Jornal do Povo Maubere. (1975, 15 November). Edição N.º 8. Editor: Departamento de Informação da FRETILIN. Dili: Imprensa Nacional de Timor-Leste.

Jornal do Povo Maubere. (1975, 22 November). Edição N.º 9. Editor: Departamento de Informação da FRETILIN. Dili: Imprensa Nacional de Timor-Leste.

Jornal do Povo Maubere. (1975, 25 Oktober). Edição N.º 5. Editor: Secção de Informação e Propaganda da FRETILIN. Dili: Imprensa Nacional de Timor-Leste.

Jornal do Povo Maubere. (1975, 27 September). Edição N.º 1. Editor: Secção de Informação e Propaganda da FRETILIN. Dili: Imprensa Nacional de Timor-Leste.

- Jornal do Povo Maubere*. (1975, 4 Desember). Edição Extra. Editor: Departamento de Informação da FRETILIN. Dili: Imprensa Nacional de Timor-Leste.
- Jornal do Povo Maubere*. (1975, 4 Oktober). Edição N.º 2. Editor: Secção de Informação e Propaganda da FRETILIN. Dili: Imprensa Nacional de Timor-Leste.
- Jornal do Povo Maubere*. (1975, 8 November). Edição N.º 7. Editor: Departamento de Informação da FRETILIN. Dili: Imprensa Nacional de Timor-Leste.
- Jornal do Povo Maubere—Lampiran: Pidato Presiden F.X. do Amaral*. (1975, 4 Desember). Dili: Imprensa Nacional de Timor-Leste.
- Jornal do Povo Maubere—Suplemento* (1975, 1 November). Dili: Imprensa Nacional de Timor-Leste.
- Jornal do Povo Maubere—Suplemento* (1975, 15 November). Dili: Imprensa Nacional de Timor-Leste.
- Jornal do Povo Maubere—Suplemento* (1975, 8 November). Dili: Imprensa Nacional de Timor-Leste.
- Leach, Michael. (2017). *Nation-Building and National Identity in Timor-Leste*. London: Routledge.
- Leach, Michael. (2017). Nation-Building and National Identity in Timor-Leste. *Journal of Southeast Asian Studies*, 48(1), 78-99.
- Leach, Michael. (2023). Nation-of-Intent to Nationalism: The Evolution of Timorese National Identity. *Journal of Contemporary Asia*, 53(2), 245-267.
- Manhitu, Yohanes. *Kamus Indonesia-Tetun, Tetun-Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mohammad, Irsyad. (2021). *Dari invasi hingga pencarian jati diri: Peranan bahasa Tetun dalam nation building Timor Leste*. Naskah tidak diterbitkan.
- Mohammad, Irsyad. (2023, September 26). Timor Leste's founding fathers' difficult road to retaining the national narrative (Part 1). *Archipelago Insight*. <https://archipelagoinsight.com/timor-lestes-founding-fathers-difficult-road-to-retaining-the-national-narrative-part-1>

- Mohammad, Irsyad. (2023, September 26). Timor Leste's founding fathers' difficult road to retaining the national narrative (Part 2). *Archipelago Insight*. <https://archipelagoinsight.com/timor-lestes-founding-fathers-difficult-road-to-retaining-the-national-narrative-part-2>
- Musiket, Yanapon. (2023). "Explaining and Understanding the LGBTQIA+ Rights Movement in Timor-Leste through Norm Life Cycle." *Tesis Magister pada Departemen Hubungan Internasional—Chulalongkorn University*.
- Niner, Sarah (ed.). (2000). *To Resist is to Win: The Autobiography of Xanana Gusmão*. Melbourne: Aurora Books.
- Niner, Sarah. (2022). Gender Relations and the Establishment of the LGBT Movement in Timor-Leste. *Women's Studies International Forum*, 93, 102613.
- Paulino, Vicente. (2011). Remembering the Portuguese Presence in Timor and Its Contribution to the Making of Timor's National and Cultural Identity. In Laura Jarnagin (Ed.), *Portuguese and Luso-Asian Legacies in Southeast Asia, 1511-2011*, Vol. 2, pp. 88-111. Singapore: ISEAS-Yusof Ishak Institute.
- Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste. (2002). *Constitution of the Democratic Republic of Timor Leste—Official Translation*. Dili: Pemerintah Timor-Leste.
- Pinto, Júlio Tomás. (2015). *Dari Invasi ke Rekonsiliasi: Dinamika Hubungan Falintil-Força de Defesa de Timor-Leste dan Tentara Nasional Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Satianegara, Rifka. 1994. *Timor Timur: Mitos dan Kenyataan*. Jakarta: Rosda Jayaputra.
- Shiosaki, Elfie. (2017). "We have resisted, now we must build": Regionalism and nation-building in Timor-Leste. *Journal of Southeast Asian Studies*, 48(1), 53-70. <https://doi.org/10.1017/S0022463416000473>
- Singh, Bilveer. (1996). *East Timor, Indonesia, and the World: Myths and Realities*. Kuala Lumpur: ADPR Consult (M).
- Taylor, John G. (1999). *East Timor: The Price of Freedom*. London: Zed Books.
- Tomodok, Eliza Meskers. (1996). *Hari-Hari Akhir Timor Portugis*. Jakarta: Pustaka Jaya.

Tribess, Camila. (2019). Fretilin's Narrative of Struggle and Collective Memory in Timor-Leste. *Memory Studies*, 12(3), 312-330.

United Nations Development Programme. (2022). *Gender Equality Strategy 2022-2025*. Dili: UNDP Timor-Leste.